

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kondisi masyarakat Pohuwato pada umumnya memiliki SDM yang masih rendah. Jenjang pendidikan yang dilalui hanya sampai SD malahan ada yang tidak pernah duduk dibangku SD, ada juga yang putus sekolah akibat biaya. Wilayah kerja masyarakat juga hanya pada pertambangan, pertanian, nelayan dan lain-lain. Sehingga tidak heran masyarakat mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dikaitkan dengan keadaan sekarang semua harga bahan pokok naik, kebutuhan anak untuk sekolah, kesemuanya mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan atau perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan maka penulis dapat menguraikan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit dan saling terkait erat satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut sering dikatakan sebagai suatu pola "lingkaran setan" yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pola tersebut berlangsung secara terus menerus dan bahkan cenderung menimbulkan dampak yang semakin buruk. Rendahnya tingkat kualitas hidup akibat minimnya fasilitas dasar, buruknya mutu sumber daya manusia, etos kerja yang lemah dan sulit berkembang, terbatasnya kemampuan mencari pekerjaan yang layak, rendahnya kemampuan menabung, sulitnya mengakses

sumber-sumber permodalan, adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin.

2. Faktor eksternal inilah yang memegang peran penting dan strategis dalam melakukan pemberdayaan(empowering) untuk meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal dalam mengorganisir diri agar secara mandiri mampu melaksanakan program peningkatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan hidup. Pola pemberdayaan masyarakat yang terkonsep, sistematis, terukur dan tepat sasaran merupakan upaya yang tepat dan efektif mendorong kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dalam hal bupati dan dinas-dinas yang terkait, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan belum dapat dilaksanakan secara intensif terutama dalam kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.
5. program penanggulangan kemiskinan di kabupaten pohuwato belum dapat berjalan secara simultan, artinya antara satu instansi dengan instansi lainnya yang terkait dengan program penanggulangankemiskinan belum dapat

terkoordinasidengan baik. Buktinya dalam kriteria penilaian kemiskinan pada masyarakat tiap instansimemiliki indikator yang berbeda.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan nampaknya antara satu instansi dengan instansi lainnya belum dapat terkoordinasidengan baik melalui kesempatan ini disarankanhendaknya program kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan perlu dilakukan dengan melakukan koordinasi secara baik antara satu instansi dengan instansi lainnya agar tidak tumpang tindih.
2. kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam program pengurangan angkakemiskinan dianggap penting dan strategis.Melalui tulisan ini disarankan hendaknya dalam proses pemilihan bantuan yang di berikan kepada masyarakat seharusnya di kawal oleh dinas-dinas yang berkaitan dengan bantuan tersebut dan harus dipercayakan kepada masyarakat untuk memilihnya tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah dalam hal ini bupati pohuwato. Karena dengan adanya kemauan masyarakat dalam menentukanmasa depan mereka maka akan dapat menunjang program di kabupaten pohuwato serta masyarakatakan memiliki rasa tanggungjawab yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan,
3. Program pengusulan proyek-proyek pembangunanmelalui dinas yang terkait hendaknya dapat melibatkan masyarakat agar supaya proyek yang dilaksanakan di Kelurahan atau di kecamatan akan mengenaيسان.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2001. *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*. Jogjakarta lapera daftar pustaka utama
- Agus Haryadi, (2008), *Kemiskinan, Mentalitas Budaya atau Kepincangan Struktural?*
- Alfian, Melly G. Tan, Dan Selo Soemardjan. 1980. *Kemiskinan Struktural*, Jakarta: YIIS,
- Ditjen Otonomi Daerah Depdagri. *Upaya Mengoptimalkan Otonomi Daerah. Dalam Jurnal Otonomi Daerah* No.4 Th. II Februari 2002
- NSetyawan, Dharma.2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta:
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet
- Surjadi Soedirja 2004. *Akuntansi Otonomi Daerah Dalam Reformasi Politik Dan Pemerintah Suatu Upaya Menuju Indonesia Baru*. Dalam Majalah Ketahanan Djambatanasional Edisi Khusus
- Tampubolon, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntunan Otonomi Daerah*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara.

Kartasamita, Ginandjar, 1995, *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi, Malang: Universitas Brawijaya.

Sudarwati, Ninik, 2009, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, Malang: Intimedia.

DeepaNarayan,dkk, 2008 *Voices of the Poor*, CV Rajawali Jakarta.

Dudley Seers 1973, *KemiskinanPenduduk di Negara berkembang*, Prenada Media Jakarta.

Esmara 2006, *KemiskinandanKebutuhanpokok* CV Rajawali Jakarta Sukirno 2000

Fernandes 2000, *Kemiskinan dan kerawanan Sosial*, PT Sinar harapan Jakarta

Saefuddin,dkk 2003, *Kemiskinanpenduduk*, PT Raja

GrafindoPersadamenanggulangikemiskinan.

Sumber lain:

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta) Balai Pustaka,2005).

Undang-Undang No.32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Pemerintahan*